



## DETERMINAN KESENJANGAN ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

**Muhaidin Masuku**

***Abstract** This study has several objectives including: (1) Analyzing and knowing how Budget Participation affects Budget Gap. (2) Analyze and find out how Information Asymmetry can moderate the relationship between Budget Participation and Budget Gap. (3) Analyze and find out how Ethics can moderate the relationship between Budget Participation and Budget Gap.*

*This research uses quantitative methods. There are several research subjects including: the head of the department, the head of the planning subdivision, the head of the field and the head of the section in each regional government organization (OPD) of the Sula Islands. A total of 248 respondents were involved in this study, with sampling using positive sampling.*

*This research has the following results: (1) Positive and significant influence on budget participation on budget gaps. (2) Information asymmetry and ethics are not moderating variables.*

**Keywords:** *Budget Gap, Budget Participation, Information Asymmetry, Ethics*

©2021 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

### PENDAHULUAN

Kesenjangan anggaran adalah ketika bawahan atau agen diberi kepercayaan untuk merencanakan anggaran, sehingga mereka merencanakan target pendapatan yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya dicapai (Priyetno, 2018 dalam Bintara 2014). Semakin besar bawahan berpartisipasi atau diberi kewenangan dalam menyusun anggaran semakin besar terjadinya kesenjangan anggaran, karena salah satu penilaian kinerja karyawan adalah capaian target anggaran. Dalam kesempatan ini bawahan akan dengan sengaja memperkecil target anggaran untuk mudah di capai, padahal sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa mereka mampu mencapainya dengan potensi yang ada. Dan juga mereka memperbesar target belanja namun realisasi belanja yang lebih kecil.

Kesenjangan anggaran akan terus berlanjut dalam setiap tahun anggaran, karena bawahan yang semakin berpartisipasi berulang kali dalam perencanaan target anggaran mereka telah memiliki banyak informasi dibandingkan dengan atasan atau pimpinan. Dalam kondisi ini akan terjadinya asimetri informasi dalam organisasi, dimana bawahan memberi informasi kepada atasan yang tidak seimbang dengan informasi yang di miliki oleh bawahan sebagai mana yang dikatakan oleh Umar (2014) dalam Apriandi Febrisa (2012), bahwa asimetri informasi adalah ketimpangan informasi antara bawahan dengan atasan, bawahan yang begitu banyak mengetahui informasi organisasi namun atasan minim dalam mengetahui informasi organisasi. Dalam kesempatan ini jika bawahan lebih banyak memiliki informasi maka sudah pasti bawahan akan memperkecil target perencanaan anggaran dari yang seharusnya di capai. Namun jika atasan yang lebih

Muhaidin Masuku (✉)

Universitas Khairun Ternate

Email : [masukumuhaidin@gmail.com](mailto:masukumuhaidin@gmail.com)

besar memiliki informasi maka bawahan akan semakin ditekan untuk lebih besar mencapai target anggaran.

Pada organisasi sektor publik jika setiap bawahan yang terlibat dalam proses anggaran memiliki etika yang baik, maka kesenjangan anggaran akan semakin kecil karena tujuan mereka adalah kepentingan rakyat. Mereka akan merencanakan target anggaran yang sesuai dengan seharusnya atau potensi yang ada. Tujuan mereka adalah kemajuan dari organisasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh (Asih, Astika, & Putri, 2016) bahwa etika seseorang akan mengarahkan ia pada sikap dan prilakunya, bagaimana ia akan bertindak dalam pengambilan keputusan yang etis dan sesuai dengan moral dasar dalam menilai baik atau tidak baiknya sesuatu tindakan.

Permasalahan mengenai kesenjangan anggaran sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya namun masih terdapat beberapa perbedaan penelitian di antaranya Afriani (2010), Febrisa (2012), Febi (2012), dan Muhammad Irfan Dkk (2016), menunjukkan partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran mempunyai hubungan yang positif, Fadilah Dk (2011) dalam Muh.Irfan (2016: 13) dan Lisa Ardila (2013) menemukan bahwa asimetri informasi dapat memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran, Biantara dan Putri (2014), Anggraeni (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan etika yang dimiliki oleh manajer, maka akan berpengaruh terhadap penurunan senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian Ayu (2010) dalam Ardila (2013:35), Lisa Apriyandi (2011), dan Ardila (2013), yang berpendapat bahwa partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran mempunyai hubungan yang negatif, Dwi dan Lidya (2010), Apriyandi (2011), yang menemukan bahwa informasi asimetri dapat memperlemah hubungan antara partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran, Asih, Astika, & Putri (2016) etika tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, artinya bahwa jika etika mengalami peningkatan namun tidak akan mempengaruhi kesenjangan anggaran.

Dari perbedaan penelitian terdahulu mengenai kesenjangan anggaran, sebagaimana dijelaskan di atas. Ternyata masalah kesenjangan anggaran juga terjadi pada APBD Kepulauan Sula.

Prose anggaran yang terjadi di Kepulauan Sula memiliki tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme perencanaan anggaran yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat dengan memperbesar capaian anggaran dan belanja anggaran pada setiap periode anggaran. Namun peneliti melihat terdapat kesenjangan anggaran pada tahun 2017 dan 2018. Pernyataan ini bisa dijelaskan oleh Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2017 & 2018**

Tahun	Uraian	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	%
2017	APBD	790.152.944.441,00	771.152.404.274,77	97,60
	Belanja	719.343.866.437,00	659.734.353.950,00	91,71
2018	APBD	809.645.280.400,00	816.468.254.298,10	100,84
	Belanja	737.232.206.970,00	663.281.930.613,04	89,97

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula



Tabel di atas peneliti menjelaskan kembali bahwa perencanaan target pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp 790.152.944.441,00. Dan realisasi atau capaian pendapatan APBD sebesar Rp 771.152.404.274,77. Artinya capaian pendapatan lebih kecil dari perencanaan pendapatan. Dan pemerintah kepulauan sula juga menetapkan anggaran untuk belanja daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 719.343.866.437,00. Dengan realisasi belanja sebesar Rp 659.734.353.950,00. Ini menandakan bahwa anggaran yang di sediakan untuk belanja daerah lebih besar daripada realisasi belanja daerah.

Tabel 1.1 juga menjelaskan bahwa perencanaan target pendapatan daerah kepulauan sula pada tahun 2018 sebesar Rp 809.645.280.400,00. Dan realisasi atau capaian pendapatan APBD sebesar Rp 816.468.254.298,10. Artinya capaian pendapatan lebih besar dari perencanaan pendapatan. Dan pemerintah kepulauan sula juga menetapkan anggaran untuk belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 737.232.206.970,00. Dengan realisasi belanja sebesar Rp 663.281.930.613,04. Ini menandakan bahwa anggaran yang di sediakan untuk belanja daerah lebih besar daripada realisasi belanja.

Data mengenai perencanaan dan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD kepulauan sula di tahun 2017 berbeda dengan tahun 2018. Di mana pada tahun 2018 terdapat indikasi terjadinya kesenjangan anggaran. Dapat di lihat kembali bahwa pada tabel 1.1 pada tahun 2018 perencanaan target pendapatan APBD lebih kecil dari realisasi pendapatan APBD. Dan anggaran yang di sediakan untuk belanja daerah tahun 2018 juga terlihat lebih besar perencanaannya daripada realisasi belanja. Hal ini sesuai dengan makna dari kesenjangan anggaran itu sendiri. Kesenjangan anggaran berpotensi akan terjadi jika perencanaan target anggaran lebih kecil dari realisasi pendapatan anggaran dan perencanaan belanja lebih besar daripada realisasi belanja.

## LANDASAN TEORI

### Agency Theory

Agency theory menjelaskan tentang hubungan antara *prinsipal* (Pemilik perusahaan) dengan *Agen* (Manajemen perusahaan). Sebagaimana dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Muh.Irfan Dkk (2016) bahwa Agensi Teori merupakan salah satu hubungan kontraktual antara *prinsipal* dan *agen*. *Prinsipial* berperan sebagai pemilik dari perusahaan dan *agen* berperan sebagai orang yang mengelola perusahaan tersebut.

Dari penjelasan mengenai agensi teori di atas, jika dikaitkan pada organisasi pemerintah daerah, maka *prinsipal* adalah dewan perwakilan rakyat (DPR) yang bertugas untuk selalu mengontrol kinerja dari *agen* yang diwakili oleh aparatur pemerintah daerah. Sering terjadinya berbagai masalah dalam organisasi pemerintah daerah salah satunya agen yang berperan sebagai pengelolaan lebih banyak mengetahui informasi pemerintahan dibandingkan dengan *prinsipal* atau DPRD yang bertugas sebagai pengontrol kinerja dari aparatur pemerintahan. Jika informasi yang dimiliki agen lebih dominan dalam pemerintahan misalnya perencanaan keuangan maka kesenjangan anggaran semakin besar.

### Teori Egoisme Etis

Teori egoisme etis merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Misalnya seseorang tersebut



menganggap bahwa bila saya hasil pekerjaan saya sesuai target maka saya akan menerima penghargaan atau tambahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Rachel, 2004) bahwa keberhasilan seseorang itu terjadi karena dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri.

Sesuai dengan penjelasan teori egoisme etis jika dikaitkan pada organisasi pemerintah daerah dalam konteks perencanaan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran, maka setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran tersebut, mereka akan bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang ada, mereka akan menentukan target perencanaan anggaran sesuai dengan potensi yang ada dan menentukan target belanja juga sesuai dengan anggaran yang ada sehingga tidak terjadinya kesenjangan anggaran atau bila terjadi namun sangat kecil. Karena tujuan mereka hanya kepentingan pribadi, jika kerja dengan benar, dan capaiannya berhasil maka akan diberi bonus atau peneliayan kerja yang baik oleh atasan.

### **Kesenjangan Anggaran (*Budgetary Slack*)**

Stevens dalam Lisa Ardila (2013) menjelaskan bahwa kesenjangan anggaran adalah proses memperkecil pendapatan meninggalkan belanja. Kesenjangan anggaran dibuat agar target anggaran dapat dicapai dengan mudah karena potensi pendapatan yang seharusnya lebih besar daripada target anggaran. Dan belanja yang tinggi dari kebutuhan yang sesungguhnya sehingga terlihat bahwa semua anggaran telah direalisasi.

Kesenjangan anggaran jika mampu diciptakan oleh bawahan maka pimpinan organisasi akan menganggap kalau kinerja bawahan sangat baik. Telah mencapai target anggaran sehingga bawahan diberi penghargaan. Karena anggaran adalah salah satu fungsi penilaian kinerja karyawan.

### **Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran adalah seberapa besar bawahan diberi kewenangan dalam berpartisipasi atau terlibat dalam proses perencanaan anggaran. Sebagaimana disampaikan oleh Anthony dan Govindarajan (2006) bahwa partisipasi anggaran adalah kewenangan yang dimiliki oleh bawahan dalam menentukan besar kecilnya sebuah perencanaan anggaran.

### **Informasi Asimetri**

Asimetri informasi adalah terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dunk dalam Fitri, (2004) bahwa informasi asimetri adalah informasi organisasi yang dimiliki oleh bawahan lebih banyak daripada informasi organisasi yang dimiliki oleh atasan.

Atasan dan bawahan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, misalnya atasan yang lebih banyak mengetahui informasi organisasi maka atasan akan cenderung menuntut untuk bawahan bekerja lebih keras dari semestinya. Dan jika bawahan yang lebih dominan memiliki informasi organisasi maka bawahan akan cenderung menurunkan target kerja yang lebih rendah untuk mudah mencapainya.

### **Etika**

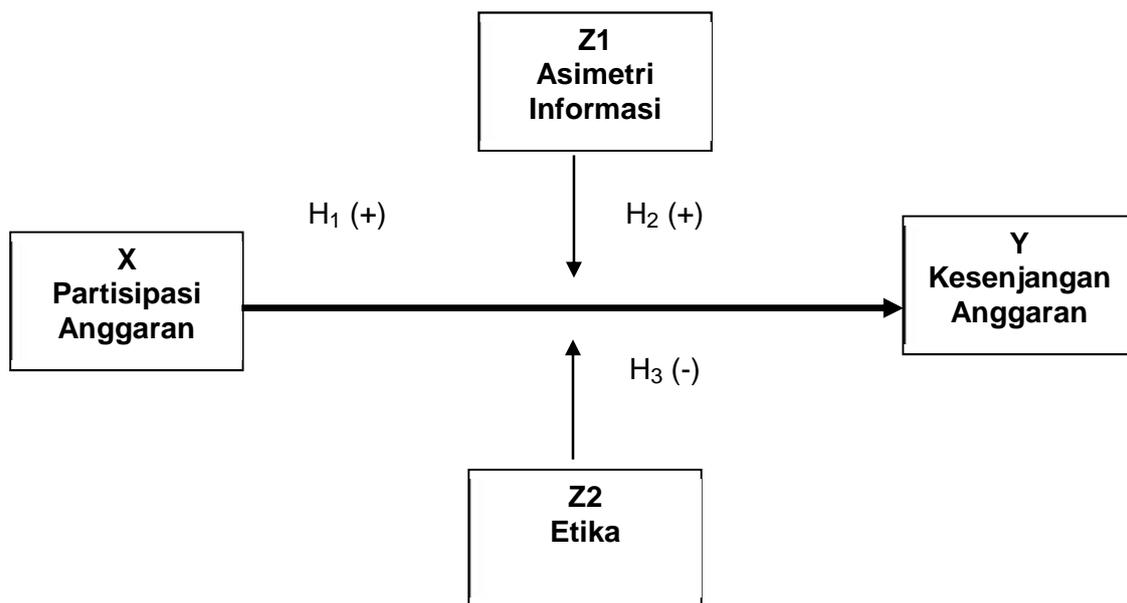
Etika merupakan suatu tindakan yang mengantarkan seseorang pada kebaikan maupun keburukan. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Haris (2010) yang menjelaskan bahwa etika adalah suatu perbuatan seseorang yang menjelaskan kebaikan dan keburukan dalam setiap tindakan yang dilakukan.



Sesorang yang berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran maka sudah pastinya memiliki etika tersendiri dalam merencanakan anggaran dalam satu periode. Jika memiliki etika yang baik dan selalu berpikir kepentingan masyarakat maka ia akan merencanakan target anggaran sesuai dengan potensi yang ada, namun jika etikanya tidak baik maka ia akan dengan sengaja memperkecil target anggaran agar mudah di capai. Sehingga menimbulkan terjadinya kesenjangan anggaran.

### Kerangka Pikir Penelitian

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dikembangkan sebelumnya, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut: 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### Hipotesis

#### 1. Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran

Kesenjangan anggaran yang terjadi dikarenakan penentuan target pendapatan yang terlalu kecil agar mudah dicapai, padahal semestinya kemampuan untuk mencapai target pendapatan telah diketahui sebelumnya dengan melihat potensi yang ada.

Jika partisipasi semakin bawahan semakin besar diberikan oleh atasan untuk membuat atau merencanakan target pendapatan maka mereka seolah-olah bekerja sesuai dengan kamaun dan kepentingan mereka. Dari sinilah bawahan akan menempatkan target pendapatan yang kecil dan memiliki pencapaian target anggaran telah terlampaui dengan demikian bawahan akan dikatakan telah berhasil dalam anggaran (Edfan, 2002). Seperti penelitian Afriani (2010), Febrisa (2012), Febi (2012), dan Muh. Irfan Dkk (2016), yang memperlihatkan bahwa semakin besarnya partisipasi bawahan dalam perencanaan target anggaran maka semakin besar pula terjadinya kesenjangan anggaran.

**H1. Di Duga Bahwa Kesenjangan Anggaran mampu dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran dengan hubungan yang Positif.**

2. Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai variabel moderasi.

Sumarno (2010) berpendapat bahwa asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan. Ketidakseimbangan informasi ini akan menimbulkan kesenjangan anggaran dalam organisasi pemerintah daerah. Jika bawahan memiliki informasi yang lebih dari pada atasan maka bawahan akan dengan mudah menciptakan kesenjangan anggaran sehingga penilaian atasan kepada bawahan semakin baik karena mampu mencapai target anggaran yang telah di desain oleh bawahan. Namun jika atasan memiliki informasi lebih besar dari bawahan, maka bawahan akan di tekan untuk bekerja lebih keras guna mencapai target anggaran yang lebih besar.

Penjelasan ini telah dijelaskan sebelumnya oleh hasil penelitian dari Fadilah Dk (2011) dalam Muh. Irfan (2016) dan Lisa Ardila (2013) yang menyatakan kesenjangan anggaran mampu dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, namun hubungan ini semakin kuat jika di moderasi oleh asimetri informasi.

**H2. Di Duga Bahwa Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran hubungan ini semakin kuat jika di Moderasi oleh Asimetri Informasi.**

3. Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran dengan Etika sebagai variabel moderasi.

Etika dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyusunan anggaran, baik bawahan ataupun atasan senantiasa menggunakan etika dalam bertindak. Seorang bawahan jika diberi kewenangan dalam berpartisipasi dalam menyusun anggaran yang senantiasa memiliki etika yang baik, maka akan tidak menganggarkan pendapatan dan biaya dibawah lebih kecil dari estimasi kinerja terbaik mereka, tetapi mereka akan menyesuaikan dengan potensi riil yang ada. Akan tetapi jika mereka mempunyai etika yang tidak baik maka mereka akan merencanakan target anggaran yang lebih kecil dari semestinya sehingga mudah dicapai atau mereka telah menciptakan kesenjangan anggaran.

Penjelasan mengenai etika yang dapat memperkecil terjadinya kesenjangan anggaran walaupun bawahan senantiasa diberi kewenangan yang besar untuk berpartisipasi dalam penentuan target anggaran telah didukung oleh hasil penelitian Biantara dan Putri (2014), Anggraeni (2016), dan Sihombing (2017) yang menjelaskan bahwa semakin baik etika yang dimiliki oleh bawahan maka akan menurunkan kesenjangan anggaran walaupun bawahan diberi partisipasi yang besar.

**H3. Di Duga Bahwa Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran hubungan ini semakin kuat jika di Moderasi oleh Etika.**

## METODOLOGI

### Desain Penelitian.

Berdasarkan pada judul penelitian dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Dengan metode kuantitatif, yakni tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebabakibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002).



### Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini di laksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kepulauan Sula. Dan waktu yang dibutuhkan oleh peneliti dari proposal hingga tesis berkisar 3 bulan. Mulai dari bulan November sampai dengan Desember tahun 2020.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kepulauan Sula yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran hingga pelaporan. Terdiri dari kepala seksi, kepala bidang, kasubag keuangan dan kepala dinas. Yang tersebar di 17 Dinas dan 6 Badan sebanyak 248 orang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Peneliti menentukan kriteria responden yang pernah terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

### Jenis dan Sumber Data

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tidak melalui perantara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data. Dalam kuesioner ini akan digunakan model pertanyaan tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang sudah disertai jawaban, sehingga responden dapat langsung menjawab.

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berupa model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan aplikasi yang bernama SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Sebelumnya dilakukan uji terhadap kualitas data melalui uji validitas dan reabilitas untuk kemudian dilakukan uji uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesa.

Penelitian ini digunakannya model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat melihat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan etika sebagai variabel moderasi, maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$KA = \alpha + \beta_1 PA + \beta_2 PA * AI + \beta_3 PA * ET + e$$

KA = Kesenjangan Anggaran

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi

PA = Partisipasi Anggaran



AI = Asimetri Informasi

ET = Etika

PA \* AI = Interaksi Antara Partisipasi Anggaran Dengan Asimetri Informasi

PA \* ET = Interaksi Antara Partisipasi Anggaran Dengan Etika

e = Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Rekapitulasi Kuisioner

Keterangan	Jumlah Kuisioner	Presentasi
Kuisioner yang tersebar	248	100%
Kuisioner tidak dikembalikan	14	6%
Kuisioner dikembalikan	234	94%
Kuisioner tidak terisi	25	10%
Kuisioner rusak	12	5%
Kuisioner tidak memenuhi kriteria sampel	76	31%
Sampel penelitian	121	49%

Sumber: Data di olah dari hasil penyebaran kuisioner penelitian 2021

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas dari 248 kuisioner yang disebarakan terdapat 14 kuisioner yang tidak kembali dan 234 dinyatakan kembali. Ditingkat pengembalian (*respon rate*) kuisioner adalah 94%. Sementara 25 kuisioner tidak terisi dan 12 kuisioner tidak memenuhi syarat atau rusak sehingga tingkat pengembalian kuisioner yang digunakan (*usable respon rate*) adalah 80%. Untuk memenuhi sampel penelitian maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria “yang pernah terlibat dalam menyusun perencanaan keuangan” kriteria ini dianggap sangat penting karena tidak mungkin orang yang belum pernah terlibat dalam proses penyusunan anggaran lalu mengetahui tentang cara dan mekanisme yang terjadi dalam proses pengusulan sampai penetapan APBD. Setelah peneliti mengeluarkan kuisioner yang tidak memenuhi kriteria maka peneliti memperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 121 atau 49% yang tersebar pada 23 SKPD Kepulauan Sula.

### Uji Validitas Data

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Indikator	Pearson Corelation	Nilai Signifikansi	Kriteria
Kesenjangan Anggaran	P1	0,553	0.000	Signifikan
	P2	0,658	0.000	Signifikan
	P3	0,785	0.000	Signifikan
	P4	0,688	0.000	Signifikan



				n
	P5	0,707	0.000	Signifika n
	P6	0,570	0.000	Signifika n
Partisipasi Anggaran	P1	0,699	0.000	Signifika n
	P2	0,710	0.000	Signifika n
	P3	0,682	0.000	Signifika n
	P4	0,617	0.000	Signifika n
	P5	0,789	0.000	Signifika n
	P6	0,543	0.000	Signifika n
Asimetri Informasi	P1	0,708	0.000	Signifika n
	P2	0,832	0.000	Signifika n
	P3	0,857	0.000	Signifika n
	P4	0,889	0.000	Signifika n
	P5	0,880	0.000	Signifika n
	P6	0,902	0.000	Signifika n
Etika	P1	0,783	0.000	Signifika n
	P2	0,744	0.000	Signifika n
	P3	0,746	0.000	Signifika n
	P4	0,765	0.000	Signifika n
	P5	0,656	0.000	Signifika n
	P6	0,579	0.000	Signifika n
	P7	0,848	0.000	Signifika n

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021



Berdasarkan tabel 4.2 di atas terlihat hasil output menunjukkan variabel Kesenjangan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, dan Etika dikatakan signifikan dengan nilai signifikansi di bawah 0.05. sehingga peneliti dapat melanjutkan pengujian ketahapan selanjutnya.

### Hasil Uji Reliabilitas Data

**Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Ket:
KA = Kesenjangan Anggaran	6	0,728	Reliable
PA = Partisipasi Anggaran	6	0,757	Reliable
AS = Asimetri Informasi	6	0,920	Reliable
ET = Etika	7	0,852	Reliable

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh Cronbach Alpha's aitem-aitem variabel memiliki nilai lebih besar dari 6 ( $> 0,60$ .)

### Uji Normalitas Data

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data**

	Standardized Residual
N	121
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,417

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *kolmogorov smirnov*  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,474. Sehingga dapat dikatakan data yang diperoleh berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastistas

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastistas**

Variabel	Tingkat Signifikansi
Kesenjangan Anggaran (KA)	0,535
Partisipasi Anggaran * Asimetri Informasi (PA_AS)	0,130
Partisipasi Anggaran * Etika (PA_ET)	0,484

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang menggunakan uji *Park*, tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel adalah  $> 0,05$ , sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastitstas.



## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Tolerance	VIF
Kesenjangan Anggaran (KA)	0,575	1,740
Partisipasi Anggaran * Asimetri Informasi (PA_AS)	0,570	1,754
Partisipasi Anggaran * Etika (PA_ET)	0,794	1,259

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Hasil uji multikolinearitas tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel kesenjangan anggaran (KA) adalah sebesar 1,740, variabel moderasi (PA\*AS) sebesar 1,754, dan variabel moderasi (PA\*AT) sebesar 1,259. Menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. Dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut.

## Kofisien determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.7 Hasil Kofisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
0,579	0,335	0,318

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan etika mampu menjelaskan senjangan anggaran sebesar 31% sesuai dengan sampel dan variabel independen. Sementara sisanya 69% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

## Uji F

**Tabel 4.8 Hasil Uji f**

Model	Df	f – hitung	Sig.
Regresi	3	19,690	0,000
Risidual	117		
Total	120		

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Hasil uji F sebesar 19,690 dengan nilai signifikansi 0,000, dengan keputusan jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 maka semua aitem variabel dependen yaitu Partisipasi anggaran, Asimetri informasi dan Etika secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen atau Kesenjangan anggaran.

## Uji t (T-test)

Uji t dilakukan guna mengetahui bagaimana kemampuan variabel independen masing-masing dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Angka



signifikansi dalam pengujian ini digunakannya 0,05. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda dengan metode MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil pengujian data dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-hitung	Signifikansi
Konstanta	2,044	0,256	7,970	0,000
PA	0,418	0,095	4,418	0,000
PA_AS	0,016	0,014	1,148	0,253
PA_ET	0,030	0,022	1,372	0,173

Sumber: Data primer yang di olah penelitian tahun 2021

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan metode MRA (*Moderated Regression Analysis*) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa:

1. Variabel partisipasi anggaran memiliki  $t_{hitung}$  4,418 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Distribusi nilai t berdasarkan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) yakni :  $df=n-k$  atau  $df=121-4=117$  maka nilai  $t_{tabeln}$  adalah 1,658. Sedangkan nilai signifikasni sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, karena  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis kesenjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh asimetri informasi dinyatakan positif dan signifikan.
2. Variabel moderasi 1 memiliki  $t_{hitung}$  1,148 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$ . Dan nilai signifikasnsinya sebesar 0,253 lebih besar dari 0,05, karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Demikian hipotesis kesenjangan anggaran dipengaruhi oleh partisipasi anggaran hubungan ini semakin kuat jika di moderasi oleh asimetri informasi tidak berlaku, atau asimetri informasi bukan variabel moderasi.
3. Variabel moderasi 2 memiliki  $t_{hitung}$  1,372 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$ . Dan nilai signifikasnsinya sebesar 0,173 lebih besar dari 0,05, karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Demikian hipotesis kesenjangan anggaran dipengaruhi oleh partisipasi anggaran hubungan ini semakin lemah jika di moderasi oleh etiketidak berlaku, atau etika bukan variabel moderasi.

Dari hasil tabel 4.12 juga di peroleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,044 + 0,418 PA + 0,016 PA*AS + 0,030 PA*ET$$

### **1. Kesenjangan Anggaran dapat dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran.**

Hasil dari pengujian hipotesis terlihat bahwa Kesenjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh partisipasi anggaran. Pengaruhnya positif dan signifikan. Pengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa bila bawahan semakin besar berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, maka kesenjangan anggaran juga semakin meningkat. Dari hasil pengujian tersebut, maka, pada SKPD Pemerintah Kepulauan Sula dapat diketahui bahwa semakin besar individu diberi kewenangan dalam partisipasi dalam menyusun anggaran akan cenderung dapat meningkatkan terjadinya kesenjangan anggaran. Dalam hal ini, SKPD selaku agen yang ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran memiliki kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan yaitu dengan mengusulkan target anggaran yang lebih kecil agar mudah dicapai dengan tujuan



kinerjanya dinilai baik. Agen yang terlibat dalam penyusunan anggaran terdorong untuk melakukan perilaku disfungsi yaitu dengan meninggikan beban dan menurunkan pendapatan yang tidak sesuai dengan kemampuan sesungguhnya.

Penelitian ini hasilnya mendukung penelitian dari Muh. Irfan Dkk (2016), Afriani (2010), Febrisa (2012) dengan kesimpulan kesenjangan anggaran akan tercipta manakala bawahan semakin besar partisipasinya dalam menyusun anggaran.

## **2. Kesenjangan Anggaran dipengaruhi oleh Partisipasi Anggaran. Pengaruh ini semakin kuat jika di moderasi oleh Asimetri Informasi.**

Nilai hasil uji t menunjukkan bahwa variabel perkalian antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi (PA\*AS) mempunyai nilai 0,253. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya di tolak.

Penolakan hipotesis moderasi (PA\*AS) menandakan bahwa ternyata variabel Asimetri informasi bukan merupakan variabel moderasi sehingga dalam pengelolaan anggaran manakala bawahan semakin besar partisipasinya ataupun semakin kecil dalam perencanaan anggaran namun tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap kesenjangan anggaran.

Fenomena ini terjadi dikarenakan Mekanisme dalam penerapan pengelolaan anggaran sektor publik di pemerintah Kepulauan Sula saat ini sudah terlihat sangat terbuka, mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran. Sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan mulai terlihat, hal ini didukung dengan telah berlakunya peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap kepala Daerah untuk selalu mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan dalam proses penyusunan anggaran. Bawahan juga telah diharuskan selalu melaporkan setiap informasi yang terjadi pada kinerja mereka kepada atasan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan informasi antara atasan dengan bawahan atau tidak terjadinya asimetri informasi. Sebagaimana dapat dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 3 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang - undangan”.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Putranto (2012), Elisa Giovani & Henny Murtini (2014), dan Lira Azhimatinnur (2013) yang menemukan variabel asimetri informasi bukan merupakan variabel moderasi pada terjadinya kesenjangan anggaran yang dipengaruhi oleh partisipasi anggaran.

## **3. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran. Pengaruh semakin kuat jika di moderasi oleh dan Etika.**

Berdasarkan uji hipotesis, interaksi antara variabel partisipasi anggaran dengan etika memiliki nilai signifikan 0,173. ini menjelaskan bahwa nilai tersebut melebihi dari 0,05 ( $0,173 > 0,05$ ) maka dapat dikatakan etika tidak dapat memoderasi pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran.

Dalam partisipasi anggaran etika tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesenjangan anggaran. Karena adanya etika yang sudah baik dalam lingkungan kerja pada masing-masing SKPD di pemerintah kepulauan sula, seperti para pegawai yang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki disiplin kerja yang baik. Bahkan setiap pegawai di haruskan untuk selalu menjunjung



tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan kerja, dan budaya lokal yang ada. Kondisi seperti ini sudah ada pada diri pegawai, sehingga mereka menganggap bahwa hal-hal yang menyangkut dengan etika tidak adanya hubungan dengan partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran.

Sesuai dengan teori etika pada bagian egoisme etis yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan pekerjaan hanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk membela kepentingan diri, tidak akan merugikan kepentingan orang lain. Jika bawahan memiliki etika egoisme etis maka bawahan akan dengan sadar bekerja sesuai dengan prosedur dan pedoman yang sudah ada tanpa harus berpikir untuk bekerja di luar pedoman yang akan merugikan pimpinan. Etika tidak akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran karena dalam proses penyusunan anggaran etika bawahan tidak memperdulikan hal itu, di sebabkan oleh bawahan hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri tanpa harus merugikan orang lain atau pimpinan SKPD.

Hal ini mendukung penelitian dari Hari ningtyas (2014), Priyetno (2018) dan Asih dkk 2016) "Partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran tidak dapat dimoderasi oleh pertimbangan etika. Dapat di simpulkan, etika tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting diantaranya:

1. Seseorang yang semakin tinggi jabtannya pada pemerintahan, semakin kecil ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan perencanaan anggaran satu tahun, begitu juga sebaliknya semakin kecil jabatannya maka semaiKn diberi peluang untuk ikut serta dalam perencanaan anggaran daerah. Dari sinilah peneliti melihat bahwa sesungguhnya kesenjangan itu terjadi melalui pada orang yang memenggang jabatan terkecil pada pemerintahan yaitu kepala seksi dan di ikuti dengan kepala bidang.
2. Seseorang yang memdudki jabatan dalam pemerintahan, jika semakin lama maka semakin kecil informasi yang mereka menyembunyikan dari atasan dan etika mereka juga semakin baik. Sebaliknya jika mereka yang baru mendudki jabatan atau masih kurang dari satu tahun maka mereka memiliki niat untuk menyembunyikan informasi dari atasan semakin besar dan memiliki etika yang belum terlalu baik.
3. Kesenjangan Anggaran terjadi karena setiap belanja modal dalam pemerintahan lebih kecil di dibandingkan dengan belanja pegawai. Sehingga perencanaan pembangunan daerah tidak memiliki dampak yang maksimal kepada masyarakat. Atau masyarakat tidak terlalalu menikmati hasil dari pembangunan baik.

## Saran

1. Pemerintah Daerah Kepulauan Sula harus lebih selektif dalam proses mutasi jabatan antara Dinas dan lebih mempertimbangkan pegawai yang lama bekerja daripada pegawai yang baru kerja atau masalah kepangkatan menjadi fondasi utama dalam mutasi bukan faktor lainnya.



2. Kepada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan, politik, dan lingkungan organisasi dalam kesenjangan anggaran.
3. Penelitian selanjutnya juga harus dapat mengambil sampel pada masing-masing SKPD lebih banyak lagi agar dalam penelitiannya dapat melihat kesenjangan anggaran di masing-masing SKPD Pemerintah Kepulauan Siula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, (2010). Etika Hamka, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Afiani, Dina. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi Terhadap Sejangkan Anggaran Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Akutansi Keuangan Universitas Diponegoro Semarang.
- Anggraeni, A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran pada Budgetary Slack dengan Asimetri Informasi, Self Esteem, Locus of Control, dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana, Bali). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan (2006) “*Sistem Pengendalian Manajemen*”, terjemahan FX. Kurniawan Tjakrawala. Salemba Empat. Jakarta.
- Apriyandi. 2011. “Pengaruh Informasi Asimetri terhadap Hubungan Antara Anggaran Partisipatif dan *Budgetary Slack* pada pemerintahan Kabupaten Wejo Makasar. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Makasar.
- Ardila, Lisa. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Sejangkan Anggaran dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akutansi: Universitas Negeri Padang.
- Armaeni. 2012. Analisis Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Informasi Asimetri terhadap Sejangkan Anggaran (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang). Jurnal Keuangan Universitas Hasanuddin Makasar.
- Asih, N. P. Y., Astika, I. B. P., & Putri, L. G. . M. A. D. (2016). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Etika, Budaya Organisasi, Opportunistic Behaviour dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
- Biantara, A.A Adi & Putri, I.G.A.M Asri Dwija. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Etika, dan Kepercayaan Diri pada Sejangkan Anggaran. E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana.
- Febrisa. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Ambiguitas Peran dan System Pengukuran Kinerja terhadap Sejangkan Anggaran (studi empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Padang). Jurnal Akutansi Padang: FE UNP.
- Fitri, Yulia. 2004. *Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Sejangkan Anggaran (Studi Empiris Pada Universitas Swasta Di Kota Bandung)*. SNA VII Denpasar. 2-3 Desember 2004.
- Hariningtyas, R. A. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Sejangkan Anggaran pada Penganggaran Partisipatif dengan Orientasi Etika Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Nominal, IV.
- Muh. Irfan Dkk, (2016), pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Sejangkan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2,



- Putri, I.G.A.A., & Pradnyantha, W. I. (2014). Pengaruh partisipasi anggaran, reputasi, dan etika pada kesenjangan anggaran pada SKPD di Pemerintahan Kota Denpasar, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Sihombing, M. Y., & Rohman, A. (2017). Analisis Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Budgetary Slack dengan Pertimbangan Etika Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Sumarno, Sonny. "Manajemen Keuangan Pemerintah", Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

